

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era politik yang semakin modern. Demokrasi sebagai azas sebuah negara, kini telah berkembang pesat melalui nilai-nilai dan kebebasan masyarakat. Elemen terpenting dalam demokrasi ialah adanya jaminan akan warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan dipilih (*right to stand for election*).¹

Untuk mewujudkan jaminan tersebut, demokrasi memiliki cara tersendiri dalam upayanya memberikan kesempatan rakyat untuk dapat ikut berpartisipasi mewujudkan negara yang diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu rakyat diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemilih dalam sebuah pemilu guna memilih pemimpin-pemimpin pilihannya masing-masing.

Untuk memberikan wadah aspirasi rakyat yang lebih terorganisir maka dibuatlah partai politik. Media partai politik adalah sebuah wadah bagi rakyat untuk mengekspresikan pemikiran politik mereka.

Dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* karangan Prof. Miriam Budiardjo, dijelaskan bahwa partai politik pertama kali lahir di Eropa Barat. Pada masa tersebut muncul pandangan bahwa rakyat merupakan bagian yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses-proses politik, maka

¹ Azizah, Nur. 2004. *Proses Penetapan Pemilih*, dalam buku; *Pemilu 2004 Dan Eksperimentasi*

pada saat itu mulai banyak bermunculan partai politik secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak yang lain.²

Selain dari buku Miriam Budiardjo tersebut diatas, pendapat yang menerangkan pentingnya adanya partai politik dalam sebuah negara demokratis guna menampung aspirasi rakyat, hal ini juga tergambar dalam buku karangan Riswandha Imawan yang mengutip pendapat dari Schattsneider 1942.

Sudah menjadi aksioma ilmu politik bahwa suatu Negara dapat disebut demokratis kalau terdapat partai-partai politik. Sebab, kehadiran partai politik berarti ada pengakuan warga Negara untuk berbeda pendapat.³

Indonesia dengan system multi-partai sekarang ini merupakan negara yang memiliki jumlah partai politik terbesar di dunia. Namun melihat meningkatnya jumlah partai politik tersebut tentunya juga akan dibarengi dengan kemajuan pendidikan politik untuk masyarakat. Menjelang pemilu 2009 dimana pemilu merupakan agenda demokrasi sehingga sering juga disebut dengan pesta demokrasi ini, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting guna kesuksesan pemilu.

Oleh karenanya disini penulis sangat tertarik dengan persepsi dari para pemilih pemula yang sebagian besar masih duduk di bangku SMA yang ada di kabupaten Bantul. Untuk jumlah pemilih pemula di kabupaten bantul dalam pemilu 2009 mendatang sebanyak 57.381 orang atau dapat dikatakan setara

² Miriam Budiardjo. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 159.

dengan perolehan 5 hingga 6 kursi di DPRD Bantul.⁴ Tentu saja hitungan 5 sampai 6 kursi tersebut apabila seluruh pemilih pemula dikabupaten Bantul menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian terlihat sekali bahwa suara dari para pemilih pemula dikabupaten Bantul untuk pemilu 2009 mendatang sangat besar. Jumlah suara yang setara dengan 5 sampai 6 kursi di DPRD tersebut lebih menegaskan lagi bahwa suara dari pemilih pemula akan sangat mempengaruhi kualitas dari hasil pemilu 2009 yang secara total pemilih tetap di kabupaten bantul berjumlah 711.737 orang tersebut.⁵

Dengan melihat kondisi dari para pemilih pemula yang secara pendidikan masih duduk dibangku SMA, tentu dapat dibayangkan bahwa tingkat pendidikan politik mereka juga sangat minim. Apabila jumlah pemilih pemula yang demikian besar ini tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai sebagai dasar mereka menentukan pilihannya dengan baik, maka akan kembali lagi pada kualitas dari hasil pemilu yang tentu saja kurang berkualitas juga.

Pendidikan pemilih merupakan bagian dari pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara, tapi menjadi domain partai politik. Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik dilaksanakan dalam rangka untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁶

Peranan partai politik juga meliputi masalah etika dan penciptaan budaya politik masyarakat, karena memang organisasi politik yang secara structural ada pada setiap tingkatan sehingga dapat mencapai tingkatan masyarakat terbawah. Organisasi ini juga memang dibentuk berdasarkan sukarela dengan kesamaan tujuan guna memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2008, bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Dan lebih tegas lagi mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain:⁷

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 di negeri ini sepertinya menjadi ajang rekor, mulai dari rekor partai politik terbanyak dan juga masa kampanye terpanjang dalam sejarah perpolitikan negeri ini.

Kampanye pemilu merupakan tahapan paling penting dalam pemilu. Pada tahapan ini pertempuran antar peserta pemilu untuk memperebutkan perhatian dan dukungan rakyat terjadi. Dalam tahapan ini sangat rentan terhadap terjadinya konflik terbuka dan terjadinya kekerasan politik. Bahkan kalau melihat masa kampanye dimasa-masa yang lalu bentrok antar pendukung partai atau calon dengan melibatkan masa juga sering terjadi dan dengan korban yang juga tidak sedikit.

Sasaran dari kampanye adalah para pemilih, terutama pemilih pemula yang pada setiap pemilu yang berdurasi 5 tahun sekali ini jumlahnya sangat besar yang mungkin dapat mencapai sekitar 20-30 persen dari jumlah seluruh pemilih.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan pengetahuan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, jangan sampai membuat para pemilih pemula tidak lagi berpikir rasional dalam menyikapi adanya pemilu.

Disisi lain, ada beberapa faktor yang juga turut berpengaruh terhadap

afiliasi politik orang tua mempunyai pengaruh yang kuat. Apabila orang tua mereka aktif dalam partai politik yang mengusung salah satu calon, terutama sebagai pengurus partai maka besar kemungkinan si anak untuk ikut. Begitu juga terhadap figur tokoh dan identifikasi politik yang diusung, variabel agama dan isu-isu politik/program dari calon ternyata tidak begitu besar pengaruhnya dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagai contoh saat ini banyak partai politik yang sengaja memanfaatkan popularitas para artis untuk memperoleh perhatian dari masyarakat, entah si artis sebagai caleg maupun pengurus dala partai tersebut.

Sebagai generasi yang dianggap baru dalam proses pemilihan, pemilih pemula memiliki energi potensial cukup kuat untuk melakukan perubahan. Kaum pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau warga negara dengan usia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan baru pertama kali memberikan pilihannya dalam pemilu, sebenarnya disatu sisi menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan, dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Akan tetapi dilihat dari segi psikologisnya para pemilih pemula secara emosional juga lebih mengkhawatirkan dalam melihat dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemilu. Adanya semangat yang meluap-

.....

ekspresi perbedaan tersebut digambarkan dengan bentuk konflik fisik antar kelompok.

Dari kecenderungan tersebut, tidaklah mengherankan jika potensi munculnya golongan putih (golput) dari pemilih pemula sangat tinggi. Terlebih jika dalam sebuah pemilu tidak ada satupun partai politik atau calon dari partai yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilih pemula. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya jangkauan politik dan putusan-putusan ekstrim yang sering diambil oleh pemilih pemula yang secara usia masih sangat hijau.

Frekuensi dan bentuk informasi yang diterima oleh para pemilih pemula juga dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap partai politik tertentu. persepsi positif yang didapat para pemilih pemula terhadap sebuah partai politik merupakan tujuan dari masing-masing partai guna memperoleh perhatian mereka. Pemilih pemula merupakan lumbung suara yang menjanjikan bagi partai politik, sehingga tak jarang berbagai carapun dilakukan untuk bisa menghimpun suara mereka. Pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula adalah sumber masalah yang cukup signifikan dalam pemilu, tak jarang suara mereka diarahkan kepada pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu saja.

Tingkat pengetahuan politik dari para pemilih pemula inilah yang kemudian menjadi sorotan saat kualitas dari hasil pemilu disebutkan. Kualitas

.....

dengan kualitas dari pilihan para pemilih yang secara pengetahuan politiknya lebih mapan.

Pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat ini tidak ada kurikulum yang mengajarkan masalah-masalah politik kepada para pemilih pemula yang sebenarnya secara syarat sebagai seorang pemilih dalam pemilu mereka telah memenuhinya. Para pemilih pemula dengan usia 17-21 tahun yang secara tingkatan pendidikan rata-rata duduk dibangku SMA tersebut, menjadi target empuk pembodohan bagi partai politik.

Kalau menengok kembali pada kurikulum pendidikan di Indonesia, maka yang kita temui adalah kurikulum pengetahuan kognitif dan saat usia pendidikan menengah disibukkan dengan target nilai dan persiapan kelulusan. Proses pembelajaran tidak menyentuh norma-norma pendidikan politik yang mencerahkan. Hal ini berakibat saat seseorang berada di pendidikan tinggi, yang konon merupakan tempat belajar berpolitik secara nyata. Akan tetapi, justru pada saat di pendidikan tinggi, pendidikan politik dipahami sebagai dasar untuk berperilaku politik praktis, itu pun berdasar pada teori yang kadang sudah tidak relevan. Maka tidak heran jika beberapa mahasiswa mengucapkan jargon politik yang kadang bertentangan dengan perilaku keseharian mereka.⁸

Dengan demikian maka penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya Persepsi Siswa SMA sebagai Pemilih Pemula Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2009, mengingat untuk seusia (baik

⁸ Ig Kingkin Teja Angkasa, Senin, 1 September 2008, *Mendesain Remaja Berpolitik*, (download: 11-09-2008). www.kompas.com

usia, sebenarnya, maupun, usia, pendidikannya) mereka akan dituntut bijak dan cerdas dalam memberikan pilihannya pada pemilu 2009 yang akan datang.

Disini penulis akan mencari persepsi siswa SMA sebagai pemilih pemula tentang pengetahuan-pengetahuan dasar tentang partai politik. Seperti yang kita tahu, bahwa partai politik merupakan elemen yang sangat penting sekali dalam sebuah Negara demokratis seperti Indonesia.

Kembali mengingat target penelitian memang kepada pemilih pemula yang secara pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap politik masih sangat rendah, maka penulis juga hanya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai partai politik yang sifatnya lebih umum. Dengan demikian maka diharapkan pertanyaan yang dibuat dan disodorkan kepada mereka tidak sia-sia karena ketidak tahuan mereka terhadap masalah yang peneliti tanyakan.

Adapun poin-poin yang kiranya penulis jadikan tolak ukur meliputi, pengetahuan siswa SMA sebagai Pemilih Pemula terhadap partai politik secara umum. Kemudian setelah mengetahui pengetahuan mereka terhadap partai politik secara umum maka dilanjutkan dengan poin yang kedua yakni, persepsi siswa terhadap partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009 yang akan datang. Poin yang ketiga adalah, persepsi siswa mengenai dampak dari multi partai pada pemilu 2009 terhadap situasi dan kondisi yang dirasakan masyarakat.

Untuk poin yang ketiga, merupakan persepsi siswa mengenai fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Dan

Dari poin-poin yang telah tertulis diatas diharapkan peneliti akan lebih mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi siswa SMA sebagai pemilih pemula terhadap partai politik peserta pemilu 2009 yang juga akan mereka ikuti.

Adapun penulis sekaligus peneliti disini dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya baik itu dana maupun tenaga, maka penulis hanya akan mengambil sampel di 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipandang sudah cukup untuk menggambarkan persepsi dari seluruh Pemilih Pemula (siswa SMA) di Kabupaten Bantul.

Sekolah Menengah Atas yang diambil sebagai studi kasus dalam penelitian ini, yaitu *Pertama*, SMA N 1 Sewon yang letak geografisnya berada didaerah perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta yang juga merupakan Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipandang sebagai sekolah yang siswa-siswanya justru lebih banyak yang berasal dari luar Kabupaten Bantul. Dengan letak yang berada diperbatasan Ibu Kota Propinsi tersebut, maka juga tentunya masukan-masukan informasi yang diterima juga berbeda dengan sekolah yang berada jauh dari Pusat Ibu Kota Propinsi.

Kedua, SMA N 2 Bantul yang secara geografis letak dari sekolah berada di daerah kota Bantul, dimana kecenderungan dan mayoritas siswanya

Dan *ketiga*, SMA Muhammadiyah 1 Bantul, Meskipun letak dari sekolah berada di pusat Kota Bantul sama dengan SMA N 2 Bantul, tapi penulis lebih melihat kepada perbandingan persepsi dari siswa Muhammadiyah, karena partai politik juga ada yang memiliki corak Muhammadiyah.

Persepsi dari ketiga sekolah dengan latar belakang letak geografis yang tentunya juga sedikit banyak membedakan informasi atau pengaruh budaya yang diterimannya. Selain itu sekolah dengan corak agama (MUHIBA) tentu akan membuat warna yang menarik untuk diteliti bersama dengan sekolah-sekolah Negeri yang secara kualitas siswa dan sumber daya pengajarnya (maupun kurikulum) yang lebih diunggulkan tersebut.

Untuk sample yang akan diambil adalah siswa kelas 3 dari masing-masing sekolah, karena siswa kelas 3 merupakan siswa yang secara syarat sebagai pemilih pemula mayoritas bahkan seluruhnya sudah berusia minimal 17 tahun dan pada pemilu 2009 telah dapat memberikan suaranya.

Dengan penelitian ini diharapkan akan lebih meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pendidikan politik. Selain siswanya juga untuk partai politik sebagai aktor utama pendorong adanya pendidikan politik bagi masyarakat termasuk generasi muda agar dapat lebih bertanggung jawab lagi

B. Rumusan Masalah

Dengan semakin dekatnya gelaran pemilu 2009, maka penulis tertarik pada rumusan masalah yakni “bagaimana persepsi siswa SMA sebagai pemilih pemula terhadap partai politik peserta pemilu 2009 (studi kasus siswa kelas 3 SMA.N.1 Sewon, SMA.N.2 Bantul dan SMA Muhammadiyah Bantul).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui sejauhmana persepsi Siswa SMA sebagai pemilih pemula tentang partai politik peserta pemilu 2009.
- b. Mengetahui sejauhmana ketertarikan Siswa SMA sebagai pemilih pemula terhadap partai politik peserta pemilu 2009.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut mengenai pendidikan politik bagi para calon-calon pemilih pemula selanjutnya.
- b. Dapat digunakan oleh partai politik untuk mengetahui persepsi para pemilih pemula (SMA) terhadap Partai, sehingga dapat

D. Kerangka Dasar Teori

1 Persepsi

Menurut Bimo Walgito persepsi dapat diartikan;

*"Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integral dalam diri individu."*⁹

Sedangkan menurut Hamner dan Organ, persepsi diartikan sebagai;

*"Persepsi adalah suatu proses yang mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi dilingkungannya."*¹⁰

Makna persepsi tersebut juga dikuatkan oleh Miftah Thoha yang memaknai persepsi sebagai;

*"Bentuknya dalam proses kognitif, yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi."*¹¹

Dari apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa; pertama, persepsi dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda-beda. Kedua, persepsi sangat dipengaruhi oleh factor latar belakang dari masing-masing individu, dimana latar belakang disini mencakup latar belakang ilmu dan lingkungan dari individu berada saat ini maupun masa lampau. Ketiga, bahwa persepsi juga sangat dipengaruhi oleh cara dan bentuk masuknya informasi yang diterima dari masing-masing

⁹ Bimo Walgito, 1991. *Psikologi Sosial Sebagai Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi Offset, Hal. 54.

¹⁰ Adam I. Indrawijaya, cetakan VII, 2002. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hal. 45.

¹¹ Miftah Thoha, 1999. *Persepsi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 10.

individu, karena indra penerima rangsang manusia dari kepekaannya juga berbedada-beda pula. Dan keempat, persepsi juga dapat berkembang bahkan berubah, hal ini dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi baru yang dikemudian waktu diterima oleh individu.

Dengan demikian maka sangatlah wajar apabila persepsi dari orang satu dengan orang yang lain berbeda, walaupun obyek yang di analisisnya adalah obyek yang sama dan dalam waktu yang sama. Latar belakang dari individu yang berbeda, dari alat indra penerima obyek individunya juga telah berbeda oleh sebab itu proses masuknya informasi juga berbeda.

Selain itu tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan dari individu juga berbeda, karena hal ini nantinya pasti juga akan mempengaruhi sudut pandang dari individu dalam menyikapi sebuah obyek. Meskipun obyek kejadiannya sama, belum tentu seseorang melihatnya dalam bentuk masalah yang sama. Missal: dalam sebuah kejadian tabrakan antara mobil dan sepeda ontel, ada orang yang menyimpulkan bahwa yang harus bertanggung jawab dalam kejadian tersebut adalah si pemilik mobil walaupun sebenarnya dalam kejadian tabrakan tersebut mobil tidaklah salah. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut adalah yang dalam kejadian salah sehingga terjadi tabrakan meskipun itu si pemilik sepeda.

Dengan demikian persepsi dipengaruhi oleh latar belakangnya. Dalam kejadian tadi ada yang berpendapat dengan mempertimbangkan factor

ekonomi jelas lebih mapan. Dan juga dapat dilihat dari latar belakang dari individu, bisa saja orang yang berpendapat bahwa mobil yang salah adalah orang yang secara social merasa senasib dengan si pemilik sepeda tersebut.

Sebelum adanya persepsi sendiri, individu menerima obyek melalui proses-proses tertentu sehingga terbentuklah sebuah kesimpulan yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sub proses dalam persepsi ada tiga macam, yang menunjukkan sifat persepsi merupakan hal yang komplek dan interaktif. Sub proses yang pertama adalah stimulus atau obyek yang haadir. Selanjutnya adalah registrasi, intepretasi dalam masa registrasi, seseorang menerima informasi melalui penginderaan. Orang tersebut akan menerima informasi yang terdengar atau terlihat padanya, lalu timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang melalui pendalaman, motivasi, dan kepribadian orang yang mempunyai persepsi. Sub proses yang terakhir yaitu umpan balik yang merupakan reaksi dari obyek persepsi.¹²

2. Partai Politik

Ada beberapa pengertian mengenai partai politik yang dikemukakan oleh pakar yang akan tertulis dibawah ini:

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah:

“sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada

Ada juga pendapat lain yakni dari R.H. Soltau:

“partai politik adalah sekelompok warga Negara sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.”¹⁴

Pengertian dari partai politik juga dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Dia menyebutkan bahwa;

“partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama, kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.”¹⁵

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa;

“partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁶

Dengan pengertian-pengertian partai politik tersebut diatas maka penulis mengambil inti sari bahwa partai politik merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan dengan suka rela bersepakat untuk bersatu dengan dasar-dasar aturan organisasi yang telah disepakati bersama demi mencapai cita-cita bersama dengan orientasi memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan politik melalui cara kontitusional.

¹⁴ Budiardjo. Op. Cit. hal. 162.

¹⁵ Budiardjo. Op.Cit. hal 160-161.

¹⁶

Apabila dalam latar belakang masalah penulis juga menyebutkan bahwa pentingnya partai politik untuk sebuah demokrasi, itu semua dikarenakan adanya fungsi partai yang sangat penting dalam berjalannya demokrasi. Oleh karenanya maka disini penulis juga akan memaparkan apa saja fungsi yang diemban oleh partai politik tersebut.

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa, dalam sebuah Negara demokrasi partai politik berfungsi sebagai:

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ini diartikan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan kegiatan seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Dengan demikian maka setiap warga Negara mempunyai kesempatan untuk menyalurkan bakatnya dalam dunia politik. Hal ini juga termasuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk dapat ikut serta dalam

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Antara lain: Pemerintah atau pejabatnya, partai politik melalui elit politiknya, para pendukung partai politik, LSM, interest group, pressure group, masyarakat umum.

Dalam UU No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan beberapa bentuk penyampaian pendapat yaitu: Unjuk rasa dan demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan bentuk lisan, tulisan, atau bentuk lain.

Singkatnya dalam komunikasi politik partai adalah Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

4. Pengatur konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam system politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik hal ini didasarkan atas konflik yang selalu terjadi dan ada di semua bagian social maupun politik, tidak hanya dalam tatanan masyarakat tapi juga pemerintahan dan partai politik sekalipun.

Oleh karenanya yang paling tepat untuk menjadi sarana pengatur konflik, baik dalam tatanan social masyarakat maupun dalam sebuah system politik. Kenapa demikian, karena partai politik merupakan organisasi yang berstruktur dan menyentuh sampai dataran akar rumput.

lebih banyak dimengerti oleh masyarakat umum dan disebut juga sebagai fungsi utama partai politik yakni:

1. mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideology tertentu.
2. mengumpulkan, mengorganisasikan dan merumuskan aspirasi rakyat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.
3. menempatkan wakil-wakil yang dipandang cukup untuk mewujudkan aspirasi rakyat atau dapat dikatakan sebagai kendaraan politik.

3. Pemilih Pemula

Amanah konstitusi menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, artinya rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling tidak dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, kedua untuk memilih wakil rakyat yang akan ditugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Cara perwujudan kedaulatan tersebut, adalah melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan ditugasi menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik masyarakat, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran

... dan lain-lain untuk memenuhi pelaksanaan fungsi di atas. Target

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor.

2. The second part is a letter from the editor to the author.

3. The third part is a letter from the author to the editor.

4. The fourth part is a letter from the editor to the author.

5. The fifth part is a letter from the author to the editor.

6. The sixth part is a letter from the editor to the author.

7. The seventh part is a letter from the author to the editor.

8. The eighth part is a letter from the editor to the author.

9. The ninth part is a letter from the author to the editor.

10. The tenth part is a letter from the editor to the author.

11. The eleventh part is a letter from the author to the editor.

12. The twelfth part is a letter from the editor to the author.

13. The thirteenth part is a letter from the author to the editor.

14. The fourteenth part is a letter from the editor to the author.

15. The fifteenth part is a letter from the author to the editor.

16. The sixteenth part is a letter from the editor to the author.

17. The seventeenth part is a letter from the author to the editor.

18. The eighteenth part is a letter from the editor to the author.

19. The nineteenth part is a letter from the author to the editor.

20. The twentieth part is a letter from the editor to the author.

21. The twenty-first part is a letter from the author to the editor.

22. The twenty-second part is a letter from the editor to the author.

Dengan azas luber dan jurdil, rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai keinginannya, tanpa perantara. Azas umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon, maupun partai politik yang mereka nilai akan mampu memperjuangkan aspirasinya apabila nantinya terpilih dalam pemilu. Pemilih dituntut cerdas untuk bisa memilih dan menilai dengan baik dan cermat siapa wakil rakyat yang pantas dan bisa memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilih haruslah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi politik publik serta pengetahuan yang baik dalam pemilu akan dapat mewujudkan suatu pemilihan umum yang berkualitas.

Kemudian siapa saja pemilih tersebut? Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menyebutkan bahwa:

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.”¹⁸

¹⁸ Peraturan KPU nomor 19 tahun 2008, pasal 1 ayat 12, dalam buku; *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009*, 2009, Yogyakarta: Pustaka Timur, hal. 68

Dalam hal ini tentu saja hak pilih yang dimiliki ialah jika telah terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat-syarat yaitu nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Hak untuk memilih harus dilaksanakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Kemudian apa yang dimaksud dengan Pemilih pemula? Disini penulis akan menyimpulkan berdasarkan arti pemilih yang telah tersebut dalam peraturan KPU no19 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 yang telah tertulis diatas tadi.

”Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan pada pemilu tahun 2009 bagi si pemilih merupakan keikutsertaan yang pertama untuk memberikan pilihannya.”

Atas dasar peraturan KPU tentang pemilih dan definisi pemilih pemula tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti persepsi dari siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pada pemilu 2009 kelak mereka telah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih pemula. Jadi disini penulis menyimpulkan usia para pemilih pemula untuk pemilu 2009 kelas adalah 17 tahun sampai dengan 21 tahun yang mana jelas mereka belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Mungkin telah banyak penelitian mengenai pemilih pemula, akan tetapi obyek penelitian tersebut biasanya adalah mahasiswa saja. Di sini

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana SMA mengingat mereka merupakan

para pemilih pemula yang boleh dikata masih sangat polos tentang masalah-masalah politik. Kenapa demikian, karena dalam kurikulum sekolah baik formal maupun informal atau eksformal dirasa masih sangat kurang bahkan tidak ada yang menggambar pengertian-pengertian dari dunia politik praktis. Pengetahuan mereka hanya sebatas pengetahuan yang didapat dari media masa yang tidak semua pemilih pemula (SMA) paham tentang masalahnya.

Dari pengetahuan politik yang masih sangat minim dan usia yang masih sangat muda mereka seringkali dijadikan target operasi bagi partai politik untuk memperoleh suara sebanyak mungkin dari mereka. Yang lebih dikhawatirkan ialah apabila cara-cara partai dalam menarik perhatian siswa SMA dengan menggunakan cara yang tidak seharusnya, seperti pembohongan dan sebagai alat pemicu konflik baik dalam partai maupun antar partai/kelompok, yang bertujuan hanya untuk mengembangkan isu-isu strategis guna menarik masa yang lebih besar lagi.

Kepolosan yang ada dalam diri pemilih pemula SMA inilah yang pada pemilu-pemilu yang lalu juga sering dijadikan alat penggerak penarikan masa dengan konvoi-konvoi kendaraan di jalan-jalan raya dan mengucapkan yel-yel parpol tertentu. Namun di saat yang sama mereka sangat tidak memahami esensi dari kampanye. Pemahaman kampanye sebatas pada uang transport, kaos parpol, dan back up kekuatan massa. Sayang sekali usia kritis dihadapkan dengan pemahaman politik kelas teri

4. Pemilu

Pengertian pemilu yang telah tertulis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum no.19 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”¹⁹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 34 partai politik sebagai peserta pemilu 2009 dalam rapat pleno di kantor KPU pada tanggal 7 Juli 2008. setelah pada pemilu 2004 partai politik jumlahnya turun menjadi 24 partai dari sebelumnya pada pemilu 1999 jumlah partai adalah 48 partai. Untuk pemilu 2009 dari 34 partai tersebut terdiri dari 16 partai adalah partai lama yang pernah mengikuti pemilu pada tahun 2004 dan telah memiliki kursi di parlemen, sedangkan 18 partai politik baru merupakan hasil dari verifikasi factual yang dilakukan KPU.²⁰

Pada pemilu 2009 juga mencatat rekor masa kampanye terpanjang, yakni selama 9 bulan. Terhitung dari tanggal 12 Juli 2008 dan berakhir pada tanggal 5 April 2009. kampanye dibagi atas dua tahapan, yaitu kampanye tertutup dan kampanye umum, dimana kampanye tertutup dilaksanakan dari tanggal 12 Juli 2008 sampai 5 April 2009. kampanye rapat umum dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2009.²¹

Untuk kampanye tertutup atau terbatas sendiri adalah kampanye yang dilakukan dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan, dimana jumlah peserta paling banyak di tingkat Pusat 1000 (seribu) orang, tingkat Propinsi 500 (lima ratus) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 250 (dua ratus lima puluh) orang, menggunakan undangan tertulis, dan atribut kampanye hanya diperkenankan dipasang sampai halaman gedung pertemuan saja.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan rapat umum adalah kampanye yang dilakukan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya, rapat umum juga dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.²³

Dengan demikian maka saat ini kampanye terbatas atau tertutup telah/sedang berlangsung. Ternyata kampanye yang baru saja berlangsung ini sudah banyak sekali diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran kampanye. Pelanggaran yang sangat mencolok adalah pemasangan atribut-atribut maupun gambar-gambar kampanye di tempat-tempat umum.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 pasal 13 ayat e dan f, yang memuat aturan kampanye pada masa kampanye terbatas yakni; atribut peserta Pemilu seperti atribut, symbol-

dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas saja.²⁴

E. Defiinsi Konsepsional

Di sini definisi konsep merupakan usaha penulis untuk memberikan kejelasan batas antara pengertian konsep satu dengan konsep yang lainnya yang juga digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah:

1. Persepsi merupakan hasil dari penerimaan seseorang terhadap suatu obyek (fenomena) tertentu, yang kemudian diolah dengan menggunakan landasan pengetahuan, sejarah, lingkungan dan budaya yang saat itu dipahami.
2. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela yang mempunyai tujuan, cita-cita dan berorientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui konstitusional (Pemilu).
3. Pemilih Pemula merupakan Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas pada pemilu tahun 2009 dan bagi si pemilih merupakan keikut sertaan

4. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih para wakil-wakilnya untuk duduk di legislative maupun eksekutif, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional akan memberikan gambaran bagaimana cara mengukur suatu variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional dapat juga diartikan sebagai petunjuk pelaksanaan penelitian. Disini akan diberikan indikator variabel dan indikator tersebut.

Adapun indikator-indikator pengukuran yang akan digunakan untuk mengukur Persepsi Siswa SMA Sebagai Pemilih Pemula terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2009 adalah:

- a. Persepsi Siswa SMA tentang fungsi Partai Politik.
- b. Persepsi Siswa SMA tentang partai-partai politik Indonesia peserta Pemilu 2009.
- c. Persepsi Siswa SMA tentang dampak dari Multi-Partai pada pemilu 2009 di Indonesia.
- d. Persepsi Siswa SMA tentang kewajiban Partai Politik di Indonesia.

Persepsi Siswa SMA tentang kewajiban Partai Politik Indonesia peserta

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, adapun penelitian kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan kemudian dianalisis.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di tiga Sekolah Menengah Atas yaitu:

- a. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul yang beralamat di Jl. R.A Kartini Jebugan Bantul 55714 Yogyakarta Telp. 0274.367309.
- b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon yang beralamat di Jl. Parangtritis Km 5 Sewon Bantul 55187 Yogyakarta Telp. 0274.374459.
- c. Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, 04 A Bantul 55711 Yogyakarta Telp. 0274.367575.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian yang akan dilakukan, hanya akan meneliti sebagian dari seluruh populasi yang ada di 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Siswa kelas 3

(tiga) dari masing-masing SMA. Berikut adalah data Siswa kelas 3 dari ketiga SMA yang akan digunakan sebagai obyek penelitian:²⁶

Tabel 1.1

**Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2008/2009
(Siswa Kelas 3 SMA)**

No.	Nama Sekolah	Siswa		Jumlah
		Putra	Putri	
1	SMA N 2 Bantul	101	175	276
2	SMA N 1 Sewon	99	173	272
3	SMA Muhammadiyah 1 Bantul	125	100	225
	Total	325	448	773

Sumber: TU SMA masing-masing.

Penulis akan memperkecil unit penelitian dengan cara mengambil sample dari jumlah seluruh populasi yang ada pada setiap sekolah, karena apabila semua populasi menjadi obyek penelitian maka akan membutuhkan banyak waktu dan tentu saja biaya yang relative besar.

Menurut Kartini Kartono, pada dasarnya tidak ada aturan ketat berapa sampel yang harus diambil dari populasi.²⁷ Namun ada juga yang mengatakan bahwa pengambilan sample dari populasi dalam sebuah penelitian yaitu sebesar 10% dari populasi dan ini juga merupakan aturan yang tidak baku. Walaupun sebenarnya dengan sample yang diambil semakin besar maka semakin representative juga hasil yang didapat.

²⁶ Tata Usaha Masing-masing Sekolah

²⁷

Masih Ada Sekolah Dasar, Masih Ada 125

Namun pertimbangan efisiensi sumber daya membatasi besarnya jumlah sample yang akan diambil.²⁸

Dengan demikian tidak ada aturan yang baku mengenai jumlah sample dari populasi yang seharusnya digunakan. Namun sebagai catatan bahwa jumlah sample yang semakin besar maka semakin representative juga hasil yang akan didapatkan.

Oleh karenanya, setelah mengetahui jumlah dari populasi obyek dari ketiga sekolah tersebut, maka penulis akan mengambil sample sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari populasi disetiap sekolah. Dengan demikian, maka:

Tabel 1.2

**Jumlah Sampel Pada Setiap Sekolah
(Sampel adalah 10% dari Populasi)**

No.	Nama Sekolah	Siswa	
		Populasi	Sampel
1	SMA N 2 Bantul	276	28
2	SMA N 1 Sewon	272	28
3	SMA Muhammadiyah 1 Bantul	225	23
	Total	773	79

4. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber yang akan digunakan oleh penulis, dan sumber tersebut adalah:

- a. Sumber Data Langsung (Primer), yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumbernya. Nara sumber yang dimaksud disini ialah responden. Selain itu guna melengkapi data obyek penelitian, maka peneliti juga mencari data dari Biro Tata Usaha masing-masing sekolah.
- b. Sumber data tidak langsung (sekunder), adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini adalah sumber yang berasal dari buku, artikel, internet atau sumber-sumber kepustakaan yang lain.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

- a. Teknik Kuesioner

Kuisisioner adalah teknik mengumpulkan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk kemudian diisi sendiri oleh responden.²⁹

- b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari responden dengan jawaban lisan dan spontan. Hasil dari wawancara ini akan digunakan sebagai tambahan data guna memperkuat dari data yang telah diperoleh dari teknik yang lain.

Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa orang saja dan diluar

dari sample atau responden. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap satu siswa kelas tiga dari masing-masing SMA, yang diambil diluar dari sample yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan tidaka akan ada ketimpangan hasil pada masing-masing sekolah.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Cara ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi ini pada dasarnya berwujud data yang diperoleh dari dokumen masing-masing sekolah, misalnya; jumlah siswa, prosentasi siswa antara putra dan putri, profil sekolah, dan segala hal yang kiranya dapat mendukung kelancaran penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian mengenai Persepsi Siswa SMA Sebagai Pemilih Pemula Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2009, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Dengan proses; setelah data diperoleh melalui berbagai cara (observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi), maka selanjutnya data akan dianalisis sesuai dengan gejala-gejala yang diteliti dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada, seperti

- a. Reduksi data adalah dengan melakukan proses menyeleksi, mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga didapatkannya kesimpulan.
- b. Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini meliputi jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja, keberkaitan kegiatan, dan table. Semuanya dilakukan untuk menata data secara teratur sehingga dapat dengan mudah dimengerti.
- c. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang dilakukan setelah data tereduksi dan tersaji dengan baik. Hal ini dikarenakan penelitian ini berdasar pada semua data yang didapat dari awal penelitian sampai akhir data dirasa sudah cukup.

Dengan demikian maka untuk mengetahui Persepsi Siswa SMA Sebagai Pemilih Pemula Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2009, peneliti menggunakan metode analisa indeks.

Rumus Indeks:

$$(f_{ax4}) + (f_{bx3}) + (f_{cx2}) + (f_{dx1})$$

Keterangan:

fa = Frekuensi yang menjawab pilihan A.

fb = Frekuensi yang menjawab pilihan B.

fd = Frekuensi yang menjawab pilihan D

N = Jumlah Sampel.

Penghitungan interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyaknya Kriteria}}$$

$$\text{Interval} = \frac{4 - 1}{4} = 0.75$$

Berarti kategori nilainya:

1.00 – 1.75 = Tidak Baik

2.51 – 3.25 = Cukup

1.76 – 2.50 = Kurang Baik

3.26 – 4.00 = Baik